RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

AMIN AMIRUDIN

NIM 210202110156



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA

SKRIPSI

OLEH:

AMIN AMIRUDIN

NIM 210202110156



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسنم الله الرخلن الرحيم

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025 Penulis,

Amin Amirudin NIM 210202110156

3F66AMX369136163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi artikel hasil penelitian/skripsi saudara Amin Amirudin, NIM 210202110156, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Ratio Decidendi Of Judges' Decisions On The Use Of Foreign Language Agreements In Indonesia"

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Malang, 19 Juni 2025 Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI NIP. 197408192000031002 <u>Dwi Fidhayanti, M.H</u> NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Amin Amirudin NIM 210202110156, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025

Dengan penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H

NIP 197805242009122003

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd

NIP 19920811201608012021

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
 NIP 199103132019032036

Ketua Penguji

Penguji Utama

(.....19m),

Sekretaris

Malang, 17 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM

NIP. 1977082220050 N003

BUKTI KONSULTASI

Nama NIM : Amin Amirudin : 210202110156

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

: Dwi Fidhayanti, M.H

Judul Skripsi

: Ratio Decidendi Of Judges' Decisions On The

Use Of Foreign Language Agreements In

Indonesia

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 November 2024	Diskusi Proposal Skripsi	g
2	17 Januari 2025	Revisi Kerangka teori & Metodologi Penelitian	}
3	24 Januari 2025	Acc Seminar Proposal	9
4	12 Maret 2025	Diskusi Hasil Seminar Proposal	9
5	11 April 2025	Penyusunan Kerangka Artikel Jurnal	٦
6	21 April 2025	Konsultasi Artikel Jurnal	,
7	22 April 2025	Diskusi dan Revisi Artikel Jurnal	9
8	12 Mei 2025	Revisi Pembahasan Jurnal	<i>)</i>
9	25 Mei 2025	Penerimaan LoA Artikel Jurnal	1
10	26 Mei 20256	ACC naskah skripsi	۶

Malang, 19 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

<u>Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI</u> NIP. 197408192000031002

MOTTO

"Musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan"

- Stephen Hawking

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Ratio Decidendi Of Judges' Decisions On The Use Of Foreign Language Agreements In Indonesia" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4. Rizka Amaliah, M.Pd Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang. Terima kasih penulis haturkan kepata beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 5. Dwi Fidhayanti, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kedua Orang tua saya, Bapak Tarsilan dan Ibu Munasih yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan terima kasih sebanyakbanyaknya lebih dari apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah

- selalu mengusahakan, selalu senantia mendo'akan penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis.
- 9. Kepada seseorang dengan NIM 210202110068 yang sangat amat baik, terimakasih telah menjadi semangat penulis selama di perantauan. Terimakasih untuk kontribusi, dukungan, dan hiburan yang diberikan, Serta kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi penulis.
- 10. Teman-temen saya yang senantiasa mendukung dan juga mengingatkan saya untuk mengerjakan tulisan ini dengan tidak ada hentinya. Terimakasih atas bantuan, semangat dan juga dukungan yang diberikan, sehingga saya bisa berada di titik ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	1
INTRODUCTION	1
RESEARCH METHOD	3
RESULT AND DISCUSSION	4
Judges' Considerations in Decisions on the Use of Foreign	Language
Agreements in Indonesia	4
Legal Effects of Foreign Language Agreements in Indonesia	10
CONCLUSION	18
REFERENCES	19
ACKNOWLEDGMENTS	22
COMPETING INTEREST	22

RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA

Amin Amirudin^{1*}, Dwi Fidhayanti²

¹⁻²Sharia Faculty, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

*Corresponding email: <u>210202110156@student.uin-malang.ac.id</u>

ABSTRACT

This research analyzes how the legal considerations of judges in deciding cases of cancellation of agreements that use foreign languages without an Indonesian version and the legal consequences of violating the obligation to use Indonesian in the agreement. The research method used in this research is normative juridical with a statutory and case approach. Primary legal materials are obtained through legislation and judges' decisions, secondary materials are obtained through relevant literature studies and explained using grammatical legal interpretation. This research reveals that there are differences and legal interpretations by judges in deciding cases of canceling agreements that use foreign languages. In Case Decision Number 3395 K/Pdt/2019 the judge stated that the agreement that did not use the Indonesian language was considered "null and void", while in Case Decision Number 1124K/Pdt/2020 the judge stated that the agreement made using a foreign language without being accompanied by the Indonesian language was still considered "valid and binding". Analysis of the legal consequences of violating the obligation to use Indonesian If viewed from the perspective of the Notary Position Law, the existence of an agreement prepared only in a foreign language without an Indonesian version is a form of violation of imperative provisions in laws and regulations, especially Article 43 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. The article explicitly stipulates that the deed is made in the Indonesian language. If it is related to a foreign party, the deed made is allowed to be in a foreign language but must be accompanied by an Indonesian version this provision is mandatory. So that agreements that are not made in Indonesian will be null and void. This research is expected to raise public awareness of the obligation to use Indonesian in agreements and the consistency of court decisions.

Keywords: Ratio Decidendi; Agreement; Legal Effect.

INTRODUCTION

Indonesian as the official language of the state language must be used in accordance with the rules, orderly, careful, and reasonable(Utama, 2020). This statement is emphasized in Article 36 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states, "The State Language is Indonesian." As a continuation, regulations regarding the use of Indonesian are regulated in Law Number 24 of

2009 concerning Flags, Language, and State Emblems, as well as National Songs. Then in the context of agreements made in Indonesia, it refers to paragraph 1 of Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices, namely "Deeds are made in Indonesian" (Kosasih, 2019).

In comparative law practice, many countries impose mandatory use of the national language in contracts valid within their jurisdiction. For example, in France and China, every domestic business contract must be written in the country's official language. This policy is not a mere formality, but is designed to protect citizens and ensure contractual fairness through a widely understood language(Brutti, 2022). Indonesia has also adopted a similar approach through Article 31 of Law No. 24 of 2009.

This shows the importance of using Bahasa Indonesia in various official documents, including notarial deeds, to ensure legal compliance and clarity in communication. In addition, the use of appropriate language also contributes to to ensure legal safeguarding for all entities engaged in the contractual arrangement (Sidik et al., 2021). The use of Bahasa Indonesia in accordance with applicable rules also facilitates better understanding between the parties involved, thereby reducing the risk of disputes.

However, in addition to the obligation to use the Indonesian language, on the facts of the trial there were 2 (two) different determinations pertinent to the employment of the Indonesian language within the context of the agreement. As in the decision of case Number 3395 K / Pdt / 2019 the judge decided that the agreement between PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. and PT Gatari Air Services in the agreement which used only foreign language was "null and void", while in the same case in the decision of case Number 1124K / Pdt / 2020 the judge decided that the agreement between PT Dunia Retail Indonesia and PT Mulia Intipelang, in which the agreement was only made using foreign language, was still "valid and binding". So, in this case, due to the difference in the results of the judge's decision, it creates legal uncertainty for every party who will make a contract in Indonesia, especially for foreign parties. This makes a legal certainty of an agreement made in a foreign language only in Indonesia as an agreement that is "null and void" or an agreement that is "valid and binding".

There have been studies on similar themes that have examined similar research, because this research is not something entirely new. However, this research has a different focus compared to previous studies. In research by Lia Salsiah (2022), agreements that are not accompanied by the Indonesian version are contrary to Law No.24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems, as well as National Songs (Salsiah et al., 2022). Similarly, in research by Annisa Nurulita Rachma (2022), the use of foreign languages in the agreement is not

expressly prohibited but still must use Indonesian as the main language in the agreement (Rachma, 2022). Likewise, research by Widi Nugrahaningsih and Marginingsih (2022), agreements made in the presence of a background that is contrary to the Law in the sense that they are made in English only, then they can be said to be canceled or not allowed(Nugrahaningsih & Marginingsih, 2022). Similarly, in research by Michael Tunggono and Sri Harini Dwiyatmi (2024), an agreement must basically be in accordance with existing regulations in order to ensure compliance with the legal stipulations set forth in the agreement which can result in the agreement being canceled (Tunggono & Dwiyatmi, 2024). Similarly, in research by Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi (2020), agreements that do not use the Indonesian language are a prohibited cause (Pasek Dwilaksmi, 2020).

Compared to previous research, this research has a differentiating element that focuses on what is the reason for the judge so that there are differences in handling cases of canceling agreements that use foreign languages without copies Indonesian and how legal certainty for parties to contracts or agreements using foreign languages. In this case, it is necessary to conduct an in-depth analysis to find out the differences and the basis for judges in deciding cases, with the aim of uniformity of decisions. This research contributes to making people aware of the importance of using Indonesian in an agreement so that later they can avoid the existence of an agreement dispute and this research is expected to be a reference in providing juridical considerations for law enforcers, especially judges in examining, adjudicating and deciding similar cases.

RESEARCH METHOD

The type of research used in this research is normative research. Normative research is research that discusses doctrines or principles in legal science(Ali, 2019) . This research examines the judge's consideration in deciding an agreement that uses a foreign language in Indonesia and its legal certainty. Based on the object of research, the approach used in this research is a statutory approach, which is an approach that focuses on analyzing legislation such as Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and a case approach that aims to analyze related to the judge's consideration in making a decision on decision Number 3395 K / Pdt / 2019 and decision Number 1124K / Pdt / 2020. The categorization and origins of legal materials in normative research encompass primary legal materials that comprise statutes and regulations, such as Law Number 2 of 2014, which pertains to amendments of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Positions, in addition to secondary legal materials that include scholarly books, academic publications, and both national and international journals pertinent to the research theme. The legal materials utilized in this investigation were acquired through comprehensive library research. To address the research inquiries, this study employs the methodology of legal interpretation. The process of interpreting legal regulations constitutes an attempt to ascertain the significance of the legal provisions, to distill their meanings or to extract and elucidate them within the context of legal texts or legal significance (Marzuki, 2017). This investigation is centered on grammatical legal interpretation. Grammatical interpretation serves to elucidate the implications of the object by way of interpreting the law, thereby examining the significance of terms or phrases that are relevant to the necessity of employing the Indonesian language within a contractual agreement.

RESULT AND DISCUSSION

Judges' Considerations in Decisions on the Use of Foreign Language Agreements in Indonesia

This subsection will discuss the issue of the use of foreign language in agreements in Indonesia and its legal implications for the validity of agreements under positive law. The main focus is given to the differences in court decisions related to foreign language agreements and the ratio decidendi of judges in interpreting them.

In Indonesian law, the validity of an agreement is regulated in Article 1320 of the Civil Code, which stipulates four main requirements, namely: an agreement between the parties, legal capacity to enter into an agreement, a clear object of agreement, and a lawful cause. These four elements are divided into two categories, namely subjective conditions and objective conditions. Subjective requirements include the agreement and capability of the parties as legal subjects, while objective requirements include the clarity of the object of the agreement as well as the legality or lawfulness of the cause of the agreement. If the subjective conditions are not met, the agreement is voidable at the request of the injured party. Conversely, if the objective conditions are not met, the agreement is null and void, meaning that it is considered never to have existed in the first place because it does not meet the basic legal provisions (Subekti, Various Agreement Laws, 2014).

In civil law systems, such as that of France, a stringent approach is adopted regarding the use of the national language in legal documents, including contracts executed within the jurisdiction of the state.

In France, the requirement to use the French language in commercial contracts is strictly governed by the Loi Toubon (Law No. 94-665 of August 4, 1994 on the Use of the French Language). Article 2 of the law mandates the use of French in employment contracts, technical documents, and all legal documents involving French parties. This obligation is mandatory in nature, and non-compliance may result in the contract being void, or at the very least, unenforceable against the French party particularly where the French party does not comprehend the foreign

language used in the contract. The French courts consistently enforce this provision to uphold legal certainty and to protect the rights of French nationals. In certain circumstances, non-compliance may result in the contract being declared null and void. The provision is intended to safeguard the interests of French citizens from potential harm arising from unfamiliarity with contractual terms drafted in a foreign language, and to uphold the supremacy of national law (Brutti, 2022). This approach aligns with Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 in Indonesia, which likewise emphasizes the use of Bahasa Indonesia as an expression of national language sovereignty.

In addition to material validity, Indonesian law also emphasizes formal validity, namely the fulfillment of procedural and administrative aspects so that the agreement is legally valid. This includes the form of the agreement (written/oral), the requirement for a notarial deed in certain agreements, the utilization of linguistic constructs in compliance with statutory regulations (Yolandini & Apriandi, 2022). According to Article 43 of Law No. 2/2014 on Notary Position, the deed must be made in Indonesian. Non-compliance with this provision can cause the deed to lose its status as an authentic deed and is not legally valid (Akbar & Cahyono, 2021).

Language is an important aspect of formal validity. Law No. 24/2009 it is imperative to utilize the Indonesian language in contractual agreements that involve parties from Indonesia. The aim is to protect national interests and prevent misinterpretation between parties (Rajagukguk, 2023). Agreements that only use a foreign language without an Indonesian version risk being considered formally invalid, especially if one of the parties claims ignorance of the contents of the agreement (Puspita, 2023). Therefore, the selection of the right language is an integral part of the legal procedures that determine the validity of an agreement so as to avoid a dispute in the agreement.

The term 'lawful cause' refers to the valid reason for an agreement, as stipulated in Article 1337 of the Civil Code. Causes that are contrary to law or public order make the agreement null and void.

As for cases of violation of the obligation to use Indonesian in agreements recorded in the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, such as cases handled by the Supreme Court with case number 3395 K/Pdt/2019, in the decision the litigant was PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. against PT Gatari Air Services (Directory of Decisions, n.d.).

Based on legal considerations, the panel of judges decided that the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) agreement that was not in Indonesian was a prohibited agreement on the grounds that the SGHA agreement had violated the Legislation, namely the provisions of Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language, and State Emblems and National Songs so as to make it null and void, the decision was contained in decision Number

617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, which was later strengthened by decision Number 408/Pdt/2018/PT.DKI and decision Number 3395 K/Pdt/2019.

The results of the above decision are inversely proportional to the decision of Case Number 1124K/Pdt/2020, in which the litigant was PT Dunia Retail Indonesia against PT Mulia Intipelang. In his decision, the judge considered that the lease agreement between the two made in a foreign language and there was no Indonesian copy remained valid and binding on the grounds that the agreement had been agreed upon when signing and PT Dunia Retail Indonesia had bad faith in its lawsuit (Directory of Decisions, n.d.).

As a country that adopts a legal codification approach, positive law, especially laws, is the main basis for judges in enforcing Indonesian law. The court has the duty to conduct legal discovery (rechtsvinding) when a statutory regulation is ambiguous or unable to regulate a particular situation, and one way to do this is through interpretation (Setiawati, 2021). As in the decision of the Panel of Judges in deciding case Number 3395 K / Pdt / 2019 which states that the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dated April 1, 2011, an agreement between PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk, with PT Gatari Air Services to be null and void is appropriate because the Standard Ground Handling Agreement (SGHA), (simplified procedure), Number .../JAS-GATARI AIR/III/2011, Between PT GATARI AIR SERVICE and PT JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk, dated April 1, 2011, that the SGHA is only made in English only, this is evidenced by the absence of translation in Indonesian, so that the agreement is contrary to Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language and State Emblem and National Anthem, in the provisions of Article 31 paragraph (1), which requires the Indonesian language to be used in every agreement, therefore agreements that do not use the Indonesian language are null and void because they are made with forbidden causes (Article 1335 and Article 1337 of the Civil Code).

Meanwhile, there is a jurisprudence that decides different things in the case of canceling a contract that is not in Indonesian, namely in the decision Number 1124K/Pdt/2020. In this case, PT Dunia Retail Indonesia filed a lawsuit for the cancellation of the Lease Agreement made in one language only, namely English between PT Dunia Retail Indonesia and PT Mulia Intipelang on the grounds that the contract was invalid because it violated Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 so that it did not meet the valid requirements of the contract, namely a halal cause. In his verdict, the judge rejected PT Dunia Retail Indonesia's lawsuit because it was proven to file for annulment with an identified default. Thus, the judge stated that the Lease Agreement and Lease Conditions made using only one language, namely English, between PT Dunia Retail Indonesia and PT Mulia Intipelang remained valid and binding.

In addition to the formal aspects of the validity of a contract, in the context of the Indonesian legal system which upholds the principles of legality and legal certainty, the judge's consideration of the validity of contracts using foreign languages is not only limited to the linguistic side. Judges are also required to assess the integrity of the contract formation process, including the parties' intentions, good faith, and substantive justice to be achieved (Aditya, 2023). In the doctrine of contract law, it is known that not all administrative violations cause the agreement to be null and void, but the impact on the substance of the agreement and the legal protection of the parties involved must be seen.

In the context of the ratio decidendi in Supreme Court Decision Number 3395 K/Pdt/2019, the enforcement of Indonesian positive legal norms is the main foundation. The judge stated that a contract that is only made in a foreign language not only violates administrative procedures, but also damages the essence of the legality of the contract because it does not comply with the mandatory provisions as stipulated in Article 31 of Law Number 24 Year 2009. Therefore, the argumentation built by the judge shows the enforcement of imperative norms as a form of national legal sovereignty, so that deviation from the norm is considered a violation of the objective terms of the contract and automatically makes the agreement null and void (Puspita Sari & Mara Ditta Caesar Purwanto, 2024). This also emphasizes the position of the norm of the use of Indonesian as a mandatory provision, not just a moral or administrative recommendation.

In contrast, in Supreme Court Decision Number 1124K/Pdt/2020, the judge positioned the language violation not as a substantive error affecting the validity of the contract, but rather as a technical issue. This consideration arose from the fact that there was no real loss suffered by the defendant and that the plaintiff had substantially breached the agreement. Thus, the judge's approach tended to be oriented towards legal efficiency and the protection of the contractual trust that had been established between the parties. This decision has the potential to open a new discourse space that linguistic aspects in agreements only become an issue if it is proven to cause significant harmful misinterpretation (Halim, 2003).

The inconsistency between the two decisions reflects the different interpretations of the imperative value of Article 31 of Law Number 24 Year 2009. Decision 3395 K/Pdt/2019 views a violation of the norm as sufficient reason to declare the contract null and void, while decision 1124K/Pdt/2020 considers that the contract remains valid as long as there is no evidence of harm or malicious intent from either party. This difference creates juridical problems regarding legal consistency that have a direct impact on legal certainty and the protection of the rights of Indonesian legal subjects in cross-language contracts.

The strengthening of the ratio decidendi argument of the decision declaring null and void is also based on the legal principle that laws and regulations must be obeyed without exception. In the principle of lex superior derogat legi inferiori, the provisions in the law have a higher position than the agreement between the parties. Therefore, the principle of freedom of contract cannot be used as a basis to override imperative legal norms (Yonar Kesuma & Mahmudah, n.d.). Article 1320 of the Civil Code mentions the legal requirements of an agreement, and when one of the objective conditions is not met, the logical legal consequence is null and void.

However, in judicial practice, a more lenient approach as in Decision Number 1124K/Pdt/2020 is considered relevant to the legal proportionality approach that takes into account the real consequences of the violation. The judge in this case did not only look at the formality of the contract, but also paid attention to the principles of justice, good faith, and stability of legal relations between business actors. In this decision, the plaintiff was considered to have filed a lawsuit with the intention of avoiding contractual obligations that had been agreed upon and carried out. Therefore, the judge's approach emphasized the principle of equity and did not immediately impose the cancellation of a contract that had been executed without prior objection.

Despite this, the decision in the case of PT Dunia Retail Indonesia is still considered inappropriate because it overrides the imperative norms of Article 1320 paragraph (4) and Article 1337 of the Civil Code and Indonesian language must be used in agreements involving Indonesian legal subjects in accordance with Article 31 of Law No. 24 of 2009 and Article 43 of the Notary Position Law.

The different views in court decisions in cases of foreign language contract annulment reflect legal uncertainty regarding the obligation to use Indonesian in contracts. The essence of the difference is whether the use of Indonesian in contracts is optional or mandatory, because it has not been explained the legal consequences of its violation. This is shown by the absence of articles regulating the legal consequences in Law Number 24 of 2009, Presidential Regulation No.63 of 2019 concerning the Use of Indonesian Language. Because in essence, a law that provides orders or consequences for violations of the law, then the law will function as protection.

As a point of comparison, civil law jurisdictions demonstrate a similar tendency to treat the use of the national language in contracts as a non-negotiable legal norm. To understand how other legal systems address comparable issues, it is essential to examine the approach taken by civil law countries such as France. In France, the law explicitly requires that contracts involving domestic parties be drafted in the French language, as stipulated under the Loi Toubon. A breach of this requirement may render the contract unenforceable against the French party.

Responding to legal uncertainty related to the obligation to use Indonesian in the contract is optional or mandatory, then by interpreting the word "mandatory" in Article 31 paragraph (1) is mandatory rules, meaning that the word "mandatory"

indicates that the agreement by the parties to the agreement must use Indonesian because the provisions of the law are legal obligations based on the law (mandatory rules), without having to wait for the implementing regulations (Suyudi & Budi, 2022), because the law already has a validity after being promulgated in the state gazette, the parties to the agreement are legal subjects who must comply with the provisions of the law. Budi, 2022), because the law already has a validity after being promulgated in the state gazette, the parties who make the agreement are legal subjects who must comply with the provisions of the law, the principle of freedom of contract in the agreement is ruled out when dealing with mandatory rules. The use of Indonesian language as required in Article 31 paragraph (1) is the sovereignty and honor of the state in the field of language, as mandated in the 1945 Constitution, therefore it must be implemented.

This issue is evident in the two types of contract nullification reflected in the differing ratio decidendi of Supreme Court Decision No. 3395 K/Pdt/2019 and Decision No. 1124K/Pdt/2020. In the former, the court regarded the violation of language requirements as a substantive breach of positive law, thereby rendering the contract null and void. In contrast, in the latter decision, the court treated the language violation as an administrative irregularity that caused no actual harm and did not affect the substantive agreement between the parties; thus, the contract was deemed valid and binding.

To avoid legal problems due to the use of foreign languages in the agreement, the most appropriate solution and in accordance with the provisions of the legislation is to prepare the agreement first in Indonesian as the main version, then accompanied by an official translation into a foreign language if it involves foreign parties. This bilingual agreement format not only fulfills the provisions of Article 31 paragraphs (1) and (2) of Law No. 24 Year 2009, but is also in line with Article 43 of the Notary Position Law which requires translations in foreign language deeds. Thus, all parties involved can understand the contents of the agreement equally, while fulfilling the formal and substantive elements in the formation of a valid agreement. In practice, the Indonesian version should be declared as the legally binding version if there are differences in interpretation between the two language versions. This provides legal certainty, as it clarifies the rules of the game used to interpret the contents of the contract in the event of a dispute. Legal certainty in this context means that there is clarity and legal protection for the parties regarding the validity and enforceability of the contract made, as well as minimizing the risk of contract cancellation at a later date due to formal defects.

Legal Effects of Foreign Language Agreements in Indonesia

This subsection will discuss the legal consequences of foreign language agreements in Indonesia, particularly in relation to the obligation to use Indonesian in contracts under Article 31 of Law No. 24/2009. The lack of strict sanctions against this violation has led to legal uncertainty.

To understand the legal consequences of agreements that use foreign languages, it is necessary to refer to Article 1337 of the Civil Code which states that a cause is considered prohibited if it is contrary to law, decency, or public order. This is closely related to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of an agreement.

"a cause is forbidden, if it is prohibited by law, or if it is contrary to good morals or public order"

The legal consequences of an agreement as stated in Article 1337 of the Civil Code are related to the validity of an agreement in Article 1320 of the Civil Code paragraph (4) which states: "A cause that is not prohibited" which is an objective requirement.

Objective conditions mean that if these conditions are not met in an agreement, the agreement is considered null and void. An agreement that is null and void is an agreement that was invalid from the start, so it is considered that it never existed and the situation will return like a beginner (H.Sidik, n.d.). It can be concluded that Article 1320 with 1337 has a strong correlation in determining the validity of an agreement.

Agreements made involving at least one of them is a party from Indonesia, whether a state institution, institution, legal entity or individual legal subject must use the Indonesian language (Auliya Yasyfa Anwar and Togi Marolop Pradana Pangaribuan, 2021). In order for the parties to obtain legal certainty, the deed must still be made in Indonesian even if it involves parties from other countries who speak foreign languages. However, a mutually agreed foreign language version may be included. This standard clause is a formal requirement of the deed of agreement (Septiara & Utomo, 2024). If this clause is violated, the deed can be declared null and void or only has evidentiary power as a deed under hand. Therefore, a deed of agreement made in a foreign language without Indonesian translation is not permitted if at least one of the parties is an Indonesian legal subject (Cahyadi et al., 2024) . Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dated April 1, 2011 made and signed between PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. and PT Gatari Air Services in English became the subject matter of the cancellation of the agreement made in a foreign language without translation into Indonesian. The South Jakarta District Court has considered this case and has given a decision in Number 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. This decision was later upheld by Number 408/Pdt/2018/PT.DKI and Number 3395 K/Pdt/2019.

The Supreme Court in its decision rejected the cassation appeal from PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk for the following reasons:

That the Agreement agreed between the two parties, namely the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) was made in English and there was no translation into Indonesian, whereas the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language and Coat of Arms and National Anthem states: "The Indonesian language must be used in Memoranda of Understanding or Agreements involving State Institutions, Government Agencies of the Republic of Indonesia, Indonesian Private institutions or individual Indonesian Citizens"; That in the case a quo the Plaintiff and Defendant are companies established under Indonesian Law, therefore the Agreement made and agreed should/should use the Indonesian language as stipulated in Law Number 24 of 2009; That because the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) is contrary to the Law, then the agreement is an agreement made with forbidden causes (Articles 1335 and 1337 of the Civil Code), such an agreement is null and void and invalid.

According to the judge's consideration, although Article 1338 of the Civil Code provides legal standing for the will of the parties and freedom of contract, the making of an agreement in a foreign language while the company is both established under Indonesian Law, then it is declared as a prohibited cause and contrary to law so that it does not fulfill the provisions regarding the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. So every agreement involving Indonesian legal subjects, especially when made by a Notary, must pay attention to the provisions of laws and regulations regarding how to make it so that the agreement is legally binding and has legal force according to Indonesian law (Irawan Aprian et al., 2024).

In this case, it should also be emphasized that there is a relevant principle of international law, namely the principle of lex loci contractus, which states that the contract is subject to the law of the country where the contract is made. When a contract is made in the jurisdiction of Indonesia, it must be subject to Indonesian national law, including the linguistic provisions in the agreement (Laitupa et al., 2022). This is to ensure that the contract is not only admissible in Indonesian courts, but also has maximum evidentiary power in the event of a dispute. This provision is reinforced by the existence of Article 43 of the Notary Position Law, which states that deeds made in Indonesia by notaries must be prepared in Indonesian, so that they are binding and can be used as valid and perfect evidence.

Furthermore, the practice of avoiding the use of Bahasa Indonesia in contracts has the potential to open loopholes for legal exploitation, especially in

unequal contractual relationships between local and foreign entities. The absence of the Bahasa Indonesia version puts local parties at a disadvantage, especially if disputes arise involving the interpretation of contractual articles. Therefore, the imposition of the use of Bahasa Indonesia is actually a form of state affirmation in protecting domestic parties and strengthening the position of national law in international transactions carried out in the territory of Indonesian jurisdiction (E. Rajagukguk, 2005).

Furthermore, the provisions of Article 1337 of the Civil Code do not only address the prohibition against unlawful contract content, but also include violations of formal legal provisions. In other words, Indonesian law views formal aspects such as language as part of the non-negotiable objective requirements. Thus, contracts that violate these formal provisions must be placed in a position as a contract that is null and void. This understanding is reinforced by the theory of legal norm qualification which distinguishes between regulative and constitutive provisions. The Indonesian language provision in the contract is a constitutive norm that determines the validity of the agreement itself (Sidharta, 2000).

In addition, in some notarial practices, there is also a non-uniform application regarding the preparation of deeds in foreign languages. Some notaries continue to make deeds even though they are only in English without including an official translation in Indonesian. This occurs due to ambiguity in the interpretation of regulations, especially regarding the phrase "shall" which is sometimes perceived as a suggestion. Therefore, in the future, an active role is needed from professional organizations such as the Indonesian Notary Association (INI) and the Directorate General of General Legal Administration to provide more detailed technical guidelines on the use of language in making deeds as well as administrative sanctions against notaries who violate these provisions (Nurhilmiyah, 2022).

Finally, it is important to emphasize that while there are currently no explicit criminal or administrative sanctions set out in Law No. 24/2009 for violations of Article 31, the legal consequences in the civil sphere remain significant. If a judge decides that an agreement is null and void because it does not use Bahasa Indonesia, then the consequence is that no legal rights and obligations arise from the agreement. Thus, the agreement is considered to have never existed (null and void ab initio), and all obligations arising from it become invalid. This interpretation is important as a form of protection for the integrity of the national legal system and encourages interested parties to comply with legal provisions as a whole.

As long as the law does not specify otherwise, the deed can be made in a language that can be understood by the interested parties and witnesses, in accordance with Article 43 paragraph 4 of Law Number 2 of 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Thus, the determination of the deed language depends on the expressed will of the parties.

The intention of the parties is the basic principle underlying every contract or agreement. Nonetheless, Article 43 paragraph 5 mandates that the Notary translates the deed into Indonesian if the deed is executed in a foreign language in accordance with the intention of the parties as referred to in paragraph (4) (Nugrahaningsih, 2022). The Deed of Agreement made in a foreign language by a Notary is authorized to bind the parties because the provisions contained in Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary are in accordance with the provisions of Law Number 24 of 2009.

Unlike agreements signed by a person that are exclusively regulated by Law No. 24 of 2009, agreements signed by a person must use Indonesian or, in the case of foreign parties, must use Indonesian and other languages. As a result, agreements formulated in a foreign language constitute a violation of legal regulations. Similarly, although an agreement notarized by a notary or registered by a notary signed by a person in a foreign language is legally binding for the parties, the agreement has no evidentiary power (Yuhelson et al., 2020).

A deed under hand is a legal document signed by the parties only, without the assistance of a civil servant. An underhand deed has the same legal force as an authentic deed in terms of the binding nature of the parties; consequently, if the agreement is executed in accordance with the provisions of the law, which means it does not violate the law, then in accordance with Article 1338 of the Civil Code, the agreement is considered valid and obligatory for the parties who signed it, making the agreement irrevocable, unless terminated by mutual consent of both parties or based on legally established reasons (Yuhelson et al., 2020). Regarding the evidentiary authority of an underhand deed, as articulated by Subekti, an underhand deed is defined as any instrument made without the mediation of a public official, and its evidentiary capacity can have the equivalent of an authentic deed (argumentum per analogiam) provided that the signatories of the agreement do not dispute their signatures, indicating an acknowledgment of the truth of the content written in the agreement. Conversely, if there is a dispute regarding the signature between the parties to the agreement, the party presenting the agreement bears the burden of proving the authenticity of the signature or the accuracy of the contents of the deed (Subekti, 2001).

Whereas an authentic deed has complete evidentiary authority, this is attributed to its formulation by an official endowed with the necessary authorization. The term "perfect" in this context signifies that the deed is capable of proving its own authenticity, can attest to the truth of the facts documented by the public official, and is recognized as valid and truthful among the contracting parties, their heirs, and the beneficiaries of their rights. An authentic certificate,

when presented before a court, is considered sufficient for the presiding judge, eliminating the need for additional evidence (Safira et al., 2024).

Despite the formation of Agreements or contracts in Indonesia being anchored on the principle of freedom of contract, this does not imply that the formulation of such agreements or contracts can be implemented without constraints in accordance with the wishes of the parties involved. The legal framework governing Agreements in Indonesia, as illustrated in the aforementioned context regarding the inherent freedom of the Agreement, continues to illustrate the parameters that must be adhered to in the drafting of such contracts in Indonesia. For example, Article 1320 of the Civil Code describes the legal prerequisites for a valid agreement, which include subjective and objective conditions. In the event of a breach of the subjective conditions as articulated in Article 1320, specifically the mutual consent of the parties to the agreement and the dual competence of those parties, a request for rescission may be filed, indicating that either party may request such rescission (Satrio, 1999). The agreement itself remains binding on both parties unless it is annulled (by a judicial authority) at the behest of the party entitled to request annulment (the incompetent party or the party who gave consent under duress), whereas a breach of the objective conditions, which pertain to certain legal justifications, may render the agreement null and void ab initio, implying that it is as if there had never been an agreement (Rakhman et al., 2021).

The use of foreign languages often gives rise to differences in interpretation among the parties involved, which consequently results in disputes between these entities, and in certain cases, escalates to judicial proceedings (Brutti, 2022); nonetheless, this reality does not prevent the general public from engaging in illicit arrangements articulated in foreign languages. This phenomenon is supported by the large number of individuals who sign agreements using a foreign language as the main mode of communication in the contracts they make.

For example, in the case of PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. vs PT Gatari Air Services, which related to the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dated April 1, 2011, the agreement was made and signed in English without an Indonesian version, which resulted in the agreement being canceled by the court.

When viewed from the perspective of the Notary Position Law, the existence of an agreement prepared only in a foreign language without an Indonesian version is a form of violation of imperative provisions in laws and regulations, especially Article 43 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The article explicitly stipulates that the deed is made in the Indonesian language. If it is related to a foreign party, the deed may be made in a foreign language but must be accompanied by an Indonesian version. This provision is not facultative, but mandatory, as a form of legal protection for parties making agreements in Indonesian jurisdiction. If the

deed is prepared only in a foreign language and does not fulfill this provision, then the deed legally loses its quality as an authentic deed and only has the evidentiary power as a deed under hand. As a result, the deed cannot be used as perfect evidence in the process of proof in court, and does not meet the formal requirements set by law (Adjie, 2009).

In practice, this is clearly seen in two cases that have risen to the cassation level, namely the case between PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. and PT Gatari Air Services, as well as the case between PT Dunia Retail Indonesia and PT Mulia Intipelang. Both agreements, respectively the Standard Ground Handling Agreement (SGHA) in 2011 and the Lease Agreement in 2014, were made entirely in English, without an official version in Indonesian. Although both parties in each case are Indonesian legal entities, the courts in both cases determined the validity of the agreements with different considerations. However, the highlight was the case of PT Dunia Retail Indonesia and PT Mulia, where the court still validated the agreement between the two. As such, this approach potentially contradicts the principle of legal certainty and the principle of legality, given that the court overrode the applicability of the imperative norm in the law that clearly requires the use of the Indonesian language. Such an agreement should not only be viewed as an administrative violation, but as a violation of the objective terms of the agreement, as it relates directly to the form and procedure prescribed by law.

Furthermore, if linked to Article 1320 of the Civil Code, non-compliance with objective requirements causes the agreement to be null and void ab initio. In this context, non-compliance with the obligation to use the Indonesian language is not just a technical shortcoming, but a form of violation of the legal framework underlying the validity of an agreement. This shows that the language requirement is an integral part of the fundamental formal validity.

Based on the number of existing cases, there are still no laws or regulations that explicitly mention sanctions or consequences. Article 31 of Law of the Republic of Indonesia Number 24 Year 2009 (for agreements in general) or Article 43 of the Law on Amendments to the Notary Office Law (for notarial deeds) can still be categorized as violated, if the deed or agreement is not made in Indonesian. Normatively, if this is violated, there are no sanctions. Although it is not emphasized that there are sanctions, it can be reviewed from the validity of the agreement as a prohibited cause. When a judge gives a verdict and states that the agreement becomes null and void because it only uses a foreign language without being accompanied by an Indonesian version, the sanctions given by the judge are not in the form of criminal or administrative, but in the form of civil legal consequences, namely the agreement is considered to have never bound the parties from the start (null void and void ab initio) (Anggraeni & Moh. Saleh, 2024). This means that no legal rights and obligations arise from the contract.

Based on Article 1 of Law Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary, there are several definitions and terms as follows: "Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has additional authority as referred to in this Law or other related laws and regulations." The definition is found in numbers 1, 7, 8, 9, and 10 (Sidik et al., 2021).

An original document made by or before a notary in accordance with the form and process prescribed in this law is known as a notarial deed, or simply "Akta". As an important part of the Notary Protocol, the Minutes of Deed serves as an original record that includes the signatures of the parties, witnesses, and notary. The words "given as a COPY OF THE SAME as read" are written at the end of the deed copy, which serves as an exact reproduction of the complete document. The words "given as a QUOTE" are recorded at the end of a deed excerpt, which is defined as a verbatim quotation of one or more parts of the deed. The Grosse Deed is characterized as one copy of the deed acknowledging the debt, starting with the title "DEMI KEADILY BASED ON THE KINGDOM OF THE Almighty" and endowed with the power of execution (Hariawan & Adjie, 2022).

Notarial deeds, minutes of deeds, copies of deeds, and excerpts of deeds must all be made in the Indonesian language in accordance with Article 43 of the Amendment to the UUJN and Law Number 24 of 2009, specifically paragraphs (1) and (2). The following are the provisions of Article 43 of the amended UUJN: (1) Acts must be performed in the Indonesian language. Paragraph (2) The notary is obligated to elucidate or clarify the substance of the deed in a language comprehensible to the individual present, should that individual lack proficiency in the language utilized within the deed. According to Paragraph (3), a deed may be made in English if the person making the deed is able to understand it. Paragraph (4) As mentioned in Paragraph (3), the notary is obliged to translate the deed into Indonesian. Paragraph (5) it is asserted that should the notary be incapable of elucidating or clarifying the deed, such elucidation or clarification shall be undertaken by an individual deemed responsible. Article (6) The document executed in the Indonesian language shall be utilized in instances where there exists a divergence of interpretation regarding the stipulations of the document referenced in paragraph (2). Of course, the person who appears before the notary to make the deed must not speak Indonesian and must only master one of the regional languages of the country; this can also be classified as not being able to speak Indonesian (Siep, 2022).

Although laws and regulations have explicitly required the use of Indonesian language in Notarial Deeds and their derivatives, in practice there is still room for different interpretations, especially when the deeds are bilingual or even only made in foreign languages. This opens up opportunities for differences in application that create legal uncertainty, especially when the deed is used as

evidence in the judicial process. In fact, the principle of legal certainty demands uniform treatment of deeds with the same status and function.

Therefore, it is imperative for the Supreme Court to issue interpretative guidelines or a Supreme Court Circular Letter (SEMA) that explicitly explains the legal consequences of notarial deeds that do not comply with the language provisions as stipulated in Article 43 of the Notary Public Office Law and Article 31 of Law 24 of 2009. With these guidelines, there will be consistency between law enforcement officials, notaries, and contracting parties in understanding the obligation to use the Indonesian language as a formal and essential aspect in the formation of a valid agreement.

Moreover, a revision or implementing regulation that explicitly regulates sanctions for violations of language provisions in notarial deeds is also needed. Provisions regarding the legal consequences of whether the deed becomes null and void, or only loses its evidentiary power as an authentic deed need to be clarified so as not to cause doubts in practice. The clarity of this norm is very important to maintain the credibility of notaries as public officials and ensure that the deeds they make can be relied upon as valid evidence.

Equally important is the need to increase awareness and guidance of notaries through periodic training and socialization initiated by professional organizations and related ministries. Effective implementation of legal rules does not only depend on normative formulations, but also on the understanding and awareness of legal practitioners in applying them. Thus, efforts to foster and supervise notaries in terms of compliance with the use of Indonesian language in every deed are very strategic to ensure that the principle of legality and strength of deeds is maintained in the national legal system.

Notarial deeds, deed minutes, deed copies, and deed citations must all be made in Indonesian in accordance with the normative provisions. Given that these documents are made in accordance with the formalities and processes outlined in the relevant regulations, the use of Indonesian in these documents is an important part of the formal qualities associated with notarial deeds. As such, notarial deeds, minutes of deeds, copies of deeds, or extracts of deeds that do not use the Indonesian language violate these formal criteria and are subject to sanctions under Article 41 of the amended UUJN. (Suwardiyati & Rustam, 2024) . These violations, as referenced in Articles 38, 39, and 40, result in the document only having the evidentiary validity of an underhand deed. In addition, the necessity of the use of Indonesian language in these notarial documents can also be scrutinized under Article 1320 of the Civil Code, particularly with regard to the objective conditions of an agreement, specifically addressing the concept of forbidden cause. It is a widely recognized principle in contract law that any agreement that violates one of the essential objective conditions is considered void ab initio. As such, Notarial

Deeds, Deed Minutes, Deed Copies, and Deed Excerpts executed without adherence to the Indonesian language are considered null and void, as they contravene one of the objective conditions, namely forbidden cause.

The provisions outlined in Article 1337 of the Civil Code explain that a cause is considered prohibited when it is prohibited by law or when it is contrary to public morality or social order. Notarial Deeds, Deed Minutes, Deed Copies, and Deed Extracts made without using the Indonesian language are clearly illegal acts because they violate the essential objective conditions prohibited in Article 1337 of the Civil Code (Sidik et al., 2021). Compliance is required when the legal system requires a contract or agreement to be made in the Indonesian language, including Notarial Deeds, Deed Minutes, Deed Copies, and Deed Excerpts. This comes with the potential for invalidation in accordance with legal standards in the event of noncompliance.

CONCLUSION

The obligation to use Bahasa Indonesia in an agreement is regulated in Article 31 paragraph 1 of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language, and State Emblems, and National Anthem. Then in the context of agreements made in Indonesia, it refers to paragraph 1 of Article 43 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices, namely "Deeds are made in Indonesian". However, it has not been regulated regarding sanctions for violating the obligation to use the Indonesian language in the agreement so that the legal consequences are determined by the judge in the relevant case decision. From the overall analysis, there are differences in legal considerations (Ratio Decidendi) by a judge in giving a decision regarding a violation of the obligation to use the Indonesian language in an agreement. The difference lies in the Supreme Court's decision in case number 3395 K/Pdt/2019 and case number 1124K/Pdt/2020. In order to create consistency of decisions and legal certainty, the legal consequences of violating the obligation to use the Indonesian language in the agreement are "null and void" because Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 states that agreements involving Indonesian parties must use the Indonesian language. This provision is a mandatory rule and is not optional

Seeing the tendency of jurisprudence that is still varied, it can be concluded that the direction of law formation in the future needs to emphasize a systemic approach that is not only fixated on the text of the law, but also considers the relationship between norms and the basic principles of treaty law. The absence of explicit sanctions in Law No. 24/2009 should not be interpreted as a free space for violations, but rather as a legal gap that requires legal discovery by judges through systematic interpretation. As a state of law, Indonesia needs to uphold the principle

of consistency of law, where imperative norms must have the same applicability in all lines of legal practice. When there are two different decisions in cases with similar substance, guidance or permanent legal precedents are needed so that judicial practice has a consistent direction, and does not cause uncertainty for the public and business actors.

For future research, a more comprehensive analysis of the practice of judicial institutions at the District Court and High Court levels in various regions of Indonesia in handling similar cases is recommended, in order to obtain a comprehensive picture of the patterns of legal considerations that develop. In addition, empirical studies on the perceptions of notaries, business actors, and law enforcers regarding the implementation of the obligation to use the Indonesian language in contracts also need to be developed to determine the extent to which this norm is understood and applied in practice. Multidisciplinary research that combines legal and sociological approaches can contribute more broadly in formulating solutions to the legal uncertainty created by this norm without explicit sanctions.

REFERENCES

- Aditya, Z. F. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law*, 2, 15–23. https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03
- Adjie, H. (2009). Hukum Notaris Indonesia. Refika Aditama.
- Akbar, A. F., & Cahyono, A. B. (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Palar | Pakuan Law Review*, 7(2), 234–251. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098
- Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Anggraeni, Y., & Moh. Saleh, M. S. (2024). The Use Of The Indonesian Language In International Contracts After The Circular Letter Of The Supreme Court Number 3 Of 2023 As Guidelines For The Implementation Of Duties For Courts. Eduvest Journal of Universal Studies, 4(5), 3938–3947. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1198
- Auliya Yasyfa Anwar dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan. (2021). Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 : Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 2021. https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540464&lokasi=lokal
- Brutti, N. (2022). The Languages of Contract: A Comparative Law Perspective with a Focus on the CISG. *European Business Law Review*, 33(2), 243–266. https://doi.org/10.54648/eulr2022008

- Cahyadi, G. D., Sukandia, I. N., & Renaya, N. (2024). Legal Status of Authentic Deed Confidentiality Drafted before Notary with Sworn Translators. 3.
- Direktori Putusan. (n.d.). Retrieved April 23, 2025, from https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html
- H.Sidik, S. (n.d.). Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata. Sinar Grafika.
- Halim, R. (2003). Hukum Perjanjian. Ghalia Indonesia.
- Hariawan, K., & Adjie, H. (2022). Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269–279. https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.7039
- Irawan Aprian, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Kurniawan. (2024). Notary's Authority to Make Deeds of Name Loan Agreement (Nominee) Related to Sale And Purchase a Land Involving Foreigners. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(4), 248–361. https://doi.org/10.59890/ijels.v2i4.1729
- Kosasih, J. I. (2019). Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian. Sinar Grafika.
- Laitupa, S., Dewi Kartika, E., & Yasser Arafat J., F. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. *Amsir Law Journal*, 3(2), 63–75. https://doi.org/10.36746/alj.v3i2.61
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nugrahaningsih, W. (2022). Deeds Between Indonesian Citizens And Foreigners. 34(2), 404–409.
- Nugrahaningsih, W., & Marginingsih, M. (2022). Akibat Hukum Perjanjian yang Menggunakan Bahasa Inggris Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(4), 1112–1117. https://doi.org/10.54371/jiip.v4i5.530
- Nurhilmiyah, N. (2022). Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professionals. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 339–348. https://doi.org/10.30596/dll.v7i2.10644
- Pasek Dwilaksmi, N. M. A. (2020). Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing. *Acta Comitas*, 5(1), 89. https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p08
- Puspita Sari, H., & Mara Ditta Caesar Purwanto, A. (2024). Akibat Hukum Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Bahasa Asing. *Wajah Hukum*, 8(2), 598–606. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1515
- Rachma, A. N. (2022). PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PERJANJIAN BISNIS DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/Pdt/2020/PT.DKI).

- Rajagukguk, E. (2005). Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional. FH-UI Press.
- Rajagukguk, F. B. (2023). PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA KETIADAAN BAHASA INDONESIAKajian Putusan Nomor 590/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 83–102. https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.515
- Rakhman, T., Khisni, A., & Purnawan, A. (2021). Juridical Analysis of Cancellation of Bonding Agreements of Selling & Buying a Plan of Land. *Sultan Agung Notary Law Review*, *3*(3), 1158. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.1158-1166
- Safira, I., Susmayanti, R., & Faris, A. N. (2024). Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Forgery of Sale and Purchase Deed (AJB) by Land Deed Official. 543–554.
- Salsiah, L., Tinjauan,), Terhadap, Y., Perjanjian, K., Bahasa, M., Di, A., & Yuridis, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 15222–15230. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7II0.9703
- Satrio, J. (1999). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Citra Aditya Bakti.
- Septiara, A., & Utomo, P. (2024). Notary's Responsibility for Legalizing Private Deeds in Foreign Languages. 6(4), 661–670.
- Setiawati, A. (2021). MASALAH PEMBATALAN PERJANJIAN YANG BERBAHASA ASING PASCA BERLAKUNYA UU NO. 24 TAHUN 2009. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.25105/HPPH.V4II.13124
- Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar Maju.
- Sidik, J., Haspada, D., & Priyanto, I. J. (2021). Notaril Bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 3(1), 57–68.
- Siep, Y. (2022). Implikasi yuridis penulisan akta notaris dan akta ppat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa indonesia. 6(1), 1116–1129.
- Subekti, R. (2001). No Title. In Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa.
- Suwardiyati, R., & Rustam, R. (2024). Regulations on the Use of Indonesian in Making Contracts According to Indonesian Positive Law. *Batulis Civil Law Review*, 5(2), 116. https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i2.2086
- Suyudi, A., & Budi, H. S. (2022). Reconsidering The Mandatory Use Of Indonesian Language In Private Commercial Contract. *Global Legal Review*, 2(2), 185. https://doi.org/10.19166/glr.v2i2.4997
- Tunggono, M., & Dwiyatmi, S. H. (2024). Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing. *The Juris*, 8(1), 80–86. https://doi.org/10.56301/juris.v8il.1178

- Utama, M. A. R. (2020). Bahasa Indonesia as Official National Language: The Legal Aspect of Presidential Regulation Number 63 of 2019. Law Research Review Quarterly, 6(2), 185–188. https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37723
- Yolandini, W., & Apriandi, M. (2022). Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia. *Lex LATA*, 2(1), 409–426. https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.555
- Yonar Kesuma, A., & Mahmudah, S. (n.d.). Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. https://doi.org/10.18415/ijmmu.vlli5.5770
- Yuhelson, Y., Sinaulan, R. L., & Utoyo, B. (2020). Existence Of Agreement In Foreign Language In The Process Of Verification In The Court. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(3), 357. https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.357-364.2020

ACKNOWLEDGMENTS

The authors may recognize those who helped in the research, especially funding supporters of research. The acknowledgment can include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or other supporters, i.e., Proofreaders, Typists, and Suppliers who may have given materials.

COMPETING INTEREST

The authors will be asked to sign this statement once the submission has been accepted.

Participants

Hari Sutra Disemadi (haridisemadi)

Amin Amirudin (amin_amirudin09)

lote	From
Dear Author, Congratulations! We are thrilled to inform you that your article has been accepted for publication in Volume 27, Number 1, June 2025, of our esteemed journal. Your work will now proceed to the copyediting phase.	haridisemadi 2025-05-24 02:37 PM
As per the journal's guidelines, the author is required to make an <u>Article Publication</u> <u>Charges</u> payment of IDR 500,000 to the following bank account:	
Bank Account Number: 094800007802 (OCBC NISP)	
Account Name: YMTI - UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	
To complete the payment process, kindly upload the payment receipt by replying to this message . Once we receive the proof of payment, we will process your article for final publication. Thank you for your valuable contribution to our journal, and we look forward to sharing your research with our readers. Best regards,	
Hari Sutra Disemadi - Universitas Internasional Batam	
Baik bapak terimakasih atas penerimaan artikel nya, untuk pembayaran berikut saya lampirkan bukti pembayaran Bukti pembayaran	amin_amirudin09 2025-05-24 11:37 PM

Add Message

Participants

Hari Sutra Disemadi (haridisemadi)

Emiliya Febriyani (emiliya_uib)

Samuel Kwesi Amoo (samuel12)

Beryl Orao (beryl2432)

Amin Amirudin (amin_amirudin09)

Messages Note From Dear Author, haridisemadi 2025-05-24 02:31 Thank you for your submission to our journal. Please find below the feedback from PM our reviewer regarding your manuscript titled "Ratio decidendi of judges' decisions on the use of foreign language agreements in Indonesia." 1. The introduction would benefit from a clearer articulation of the legal issue and a more defined research question or thesis statement. 2. We recommend expanding the comparative legal analysis, particularly by drawing parallels with the legal systems of other civil law countries. 3. Please enhance the coherence and structure of your argumentation by reducing redundancies and improving the logical flow of ideas. 4. Further doctrinal elaboration on the legal consequences of language violations in contracts is suggested, especially concerning the distinction between administrative and substantive nullity. 5. It is encouraged to include policy or legal reform suggestions to strengthen the practical implications of your findings. Kindly revise the manuscript accordingly, highlighting your changes in yellow, and submit the revised version by replying to this message no later than June 5, 2025. Best regards, Editor || R Baik terima kasih bapak/editor yang terhormat atas saran dan reviewnya, amin_amirudin09 2025-05-24 10:45 berikut saya lampirkan untuk revisinya PM REVISI RATIO DECIDENDI OF JUDGES' DECISIONS ON THE USE OF FOREIGN LANGUAGE AGREEMENTS IN INDONESIA.docx

Add Message